BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perangkat daerah merupakan organisasi atau lembaga pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di suatu daerah. Akuntabilitas menjadi hal penting bagi instansi pemerintah dalam mengelola suatu organisasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah media untuk menyampaikan keberhasilan ataupun kegagalan dalam rangka pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi di instansi pemerintah. Adanya akuntabilitas dalam instansi pemerintah akan menciptakan sebuah pemerintahan yang baik sehingga dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Fenomena yang terdapat di Organisasi Perangkat Daerah Pati. Pada September 2019, Bupati menghimbau kepada jajarannya untuk segera melakukan koordinasi dengan Seketaris Dewan (Sekwan) terkait pembentukan alat kelengkapan DPRD. Hal ini diperlukan agar Kabupaten Pati tidak ketinggalan dengan daerah-daerah lain karena dengan segera terbentuknya alat kelengkapan DPRD maka secara otomatis program-program yang tersusun di tahun 2019 akan terlaksana. Selain itu Bupati juga mengingatkan kepada semua peserta yang hadir khususnya para kepala OPD, jika mempunyai jadwal diluar program harus selalu dipantau, diawasi, dan segera dilaksanakan agar kedepannya tidak menimbulkan masalah-masalah maupun persoalan baru.

Terlebih yang kaitannya dengan Dana Desa (DD), kemudian Alokasi Dana Desa (ADD) maupun yang lain. Sebab di lapangan ada satu sampai dua desa yang perlu di konfirmasi terkait penggunaan Dana Desa (DD) yang memunculkan persoalan. Bupati juga meminta bantuan kepada Dispermadesuntuk ikut memantau. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi segala persoalan yang dapat muncul kaitannya dengan Dana Desa (DD). Karena belum lama ini Pemkab Pati mendapat kunjungan dari BPK Provinsi dan Kementrian Keuangan dan lain-lain bahwa laporan pertanggungjawabannya baik namun implementasi dilapangan tidak cukup baik sehingga hal ini dapat menimbulkan permasalahan dilapangan. (www.patikab.go.id, 2019)

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu pengendaian akuntansi. Pengendalian akuntansi merupakan suatu perencanaan, prosedur, dan sistem pelaporan yang bersangkutan dengan penjagaan harta atau aset organisasi (Pratama, dkk, 2019). Pengendalian akuntansi dapat mengawasi dan mengontrol dari seluruh kegiatan yang terdapat di instansi yang bersangkutan. Tercapainya pengendalian akuntansi maka dapat dikatakan tercapainya suatu prestasi yang dapat meningkatkan kualitas dari akuntabilitas kinerja instansi tersebut.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sistem pelaporan. Menurut Syamsidar, dkk (2018) pelaporan kinerja merupakan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses

pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib untuk menyiapkan, menyusun, dan melaporkan suatu laporan keuangan secara tertulis, periodik, dan melembaga. Sistem pelaporan diharapkan pemerintah dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam menerapkan anggaran yang telah ditentukan.

Selain sistem pelaporan hal lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran telah ditetapkan secara jelas dan spesifik agar anggaran dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut (Pratama, dkk, 2019). Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan suatu anggaran secara spesifik, jelas dan dapat dimengerti oleh siapapun yang bertanggung jawab. Adanya sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas-tugas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Ketaatan pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga menjadi hal yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Peraturan yang mengatur keuangan sector publik adalah Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Abdallah, 2018). Ketaatan pada SAP memiliki peranan penting dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Anggaran yang dikelola oleh pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena dengan adanya peraturan tersebut,

diharapkan laporan akuntabilitas yang didapatkan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor lainnya yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu pemanfaatan teknologi informasi, yang merupakan perilaku atau sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya (Soleman, dkk. 2019). Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan di pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi ini diharapkan dapat mempermudah proses pelayanan dan mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat.

Faktor yang terakhir dalam akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu kompetensi aparatur pemerintah. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar, (Abdallah, 2018). Kompetensi disini mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang harus dimiliki oleh aparatur pemerintah. Pentingnya kompetensi aparatur pemerintah dalam instansi pemerintahan karena akan dapat membantu pemerintahan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2019) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian dari Rahmawati dan Rahayu (2019) menyatakan bahwa

pengendalian akuntansi tidak berpengaruh dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian oleh Abdallah (2018), Mubaraq (2017) menyatakan bahwa ketaatan peraturan perundang-undangan dan kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif, berbeda dengan penelitian dari Lumenta dkk (2016), Sweetenia (2019) yang menyatakan bahwa ketaatan peraturan perundang-undangan dan kompetensi aparatur pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu menunjukkan berbagai hasil yang beragam. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama, dkk (2019) yang menggunakan variabel pengendalian akuntansi, sistem pelaporan dan kejelasan sasaran anggaran. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Pratama,dkk (2019) adalah pada penambahan variabel ketaatan pada standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pemerintah. Alasan dengan penambahan variabel ketaatan pada Standar Akuntansi Pemerintah karena dengan adanya peraturan, pemerintah akan patuh dan bertanggung jawab pada kinerja pemerintahan sesuai dengan atura yang berlaku. Di era sekarang perkembangan zaman sudah maju sehingga dengan adanya teknologi akan memudahkan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawab terhadap pekerjaannya. Untuk yang terakhir penambahan variabel kompetensi aparatur pemerintah karena kompetensi yang dimiliki oleh pegawainya penting untuk tujuan pemerintah dalam

mencapai tugas yang telah ditetapkan. Selain penambahan variabel, perbedaan penelitian ini dengan penelitian Pratama, dkk (2019) yaitu pada obyek penelitian yang digunakan. Pada penelitian Pratama, dkk (2019) melakukan penelitian di Padang Pariaman sedangkan penelitian ini di Kabupaten Pati.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini berjudul **"PENGARUH PENGENDALIAN AKUNTANSI, SISTEM PELAPORAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KETAATAN PADA STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI)".**

1.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini membatasi sebagai berikut:

1. Penelitian menggunakan variabel pengendalian akuntansi (X_1), sistem pelaporan (X_2), kejelasan sasaran anggaran (X_3), ketaatan pada standar akuntansi pemerintah (X_4), pemanfaatan teknologi informasi (X_5), dan kompetensi aparatur pemerintah(X_6) sebagai variabel independen dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) sebagai variabel dependen.
2. Obyek dan penelitian ini difokuskan pada OPD Kabupaten Pati.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
2. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
3. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
4. Apakah ketaatan pada standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?
6. Apakah kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Untuk menguji pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
3. Untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Untuk menguji pengaruh ketaatan pada Standar Akuntansi Pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

5. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
6. Untuk menguji pengaruh kompetensi aparatur pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi akademisi

   Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperbanyak bahan kepustakaan serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik.
2. Bagi OPD Kabupaten Pati

   Diharapkan dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk bahan evaluasi serta pengambilan keputusan pada kebijakan selanjutnya guna dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.
3. Bagi Masyarakat

   Diharapkan pada penelitian ini masyarakat dapat mengetahui informasi yang berkaitan dengan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan tanggungjawabnya.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian khususnya untuk akuntansi sektor publik.